

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan potensi pariwisata sangat beragam yaitu keragaman suku bangsa dan budaya yang sangat berbeda pada setiap daerah, serta didukung oleh adanya sumber daya alam maupun keindahan alam yang melimpah mampu menarik perhatian manusia untuk datang dan mengunjungi daerah tersebut. Potensi yang begitu besar sangat mempengaruhi perkembangan dari sektor pariwisata itu sendiri. Pariwisata adalah peluang besar yang tidak dapat dilepaskan begitu saja oleh Indonesia dengan segala potensial keuntungannya (Daryusti, 2018). Pariwisata menjadi salah satu sektor kunci dan andalan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

Tabel 1.1
Devisa Sektor Pariwisata Indonesia (Miliar USD)
Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Devisa Sektor Pariwisata (Miliar USD)
1	2019	16,91
2	2020	3,38
3	2021	0,52
4	2022	6,72
5	2023	10,46

(Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024)

Sumbangan devisa negara oleh sektor pariwisata yang terus meningkat dapat menunjukkan bukti dari perkembangan positif pariwisata sebagai sumber pemasukan ekonomi negara yang potensial. Sumbangan devisa dari sektor pariwisata mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 6,72 Miliar USD dan

tahun 2023 sebesar 10,46, yang sebelumnya harus mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Potensi besar dari pertumbuhan pariwisata Indonesia perlu terus dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan potensi – potensi pariwisata Indonesia.

Tren wisata maupun kejenuhan masyarakat terhadap produk-produk wisata yang ditawarkan serta adanya keinginan untuk kembali merasakan kehidupan alam di pedesaan untuk berinteraksi dengan aktivitas sosial budaya masyarakat menyebabkan berkembangnya daerah pedesaan yang dikemas menjadi desa wisata. Hal tersebut didukung dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar pada masyarakat untuk membangun wilayah dan memanfaatkan potensi wilayahnya dengan optimal. Desa wisata menjadi bentuk pariwisata yang memperlihatkan dan memanfaatkan potensi yang unggul di suatu desa sebagai nilai daya tarik. Desa wisata adalah bentuk kolaborasi antara atraksi dan sarana pendukung yang dikemas dalam kehidupan masyarakat yang menyatu dengan adat istiadat dan tradisi yang ada sehingga berkembang menjadi destinasi wisata (Nuryanti dalam Naibaho et al., 2023). Dalam perkembangannya, desa wisata terus meningkat jumlahnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat pada tahun 2023, terdapat 4.674 desa wisata di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 36,7% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 3.419 dan meningkat pesat dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 1.831.

Sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan pengembangan

desa wisata sebagai bagian dari program pembangunan daerah. Salah satu daerah yang menawarkan beragam wisata adalah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki beragam jenis potensi pariwisata, seperti pengembangan sektor pariwisata alam maupun budaya. Pengembangan sektor pariwisata sebagai prioritas nasional telah diagendakan dalam RPJMN tahun 2020-2024, khususnya di Jawa Tengah yang didukung oleh RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Pengembangan sektor pariwisata juga dilakukan dengan menggunakan berbagai program, salah satunya program pemberdayaan masyarakat. Desa wisata dianggap sebagai salah satu wujud pengimplementasian pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Pembentukan dan pengembangan desa wisata terus diupayakan Provinsi Jawa Tengah sebagai dorongan dalam menciptakan potensi daerah. Pengembangan desa wisata di Jawa Tengah turut didukung melalui hadirnya Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi wujud dukungan pemerintah daerah tentang keberadaan desa wisata (Mubarokah et al., 2022).

Provinsi Jawa Tengah memiliki keragaman desa wisata dengan kearifan lokal di setiap wilayahnya. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, disebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 wilayah Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang meliputi DPP Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya; DPP Semarang–Karimunjawa dan

sekitarnya; DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya; DPP Borobudur–Dieng dan sekitarnya; DPP Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; serta DPP Rembang–Blora dan sekitarnya.

Tabel 1.2
Jumlah Desa Wisata Menurut Wilayah DPP
Provinsi Jateng Tahun 2023

NO	DPP (Wilayah)	Kabupaten/Kota	Rintisan	Berkembang	Maju
1	DPP Nusakambangan–Baturraden	KSPP Baturraden, KSPP Cilacap–Nusakambangan, KPPP Karst Kebumen, KPPP Serayu, KPPP Purbalingga.	88	29	2
2	DPP Semarang–Karimunjawa	KSPP Karimunjawa, KSPP Semarang Kota, KSPP Gedongsongo–Rawa Pening, KSPP Demak–Kudus, KPPP Kendal, KPPP Jepara, KPPP Pati, KPPP Purwodadi.	176	48	2
3	DPP Solo–Sangiran	KSPP Sangiran, KSPP Solo Kota, KPPP Cetho–Sukuh, KPPP Wonogiri, KPPP Tawangmangu	115	28	6
4	DPP Borobudur–Dieng	KSPP Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota, KSPP Prambanan–Klaten Kota, KSPP Merapi–Merbabu, KSPP Dieng, KPPP Purworejo, KPPP Kledung Pass.	162	35	9
5	DPP Tegal–Pekalongan	KSPP Pekalongan Kota, KPPP Linggoasri–Petungkriyono, KPPP Batang, KPPP Pemalang, KPPP Kaligua–Malahayu.	80	20	4
6	DPP Rembang–Blora	KSPP Rembang, KPPP Blora, KPPP Cepu.	22	20	4

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2023)

Jumlah desa wisata di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Profil dan Data Desa Wisata Tahun 2023 oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah mencapai 687 desa wisata yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Berdasarkan wilayah DPP Semarang-Karimunjawa memiliki jumlah desa wisata terbanyak 266 desa wisata, kemudian terdapat DPP Borobudur-Dieng sebanyak 225 desa wisata, sementara dengan jumlah paling sedikit DPP Rembang-Blora sebanyak 46 desa wisata. Dalam DPP Borobudur-Dieng menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki jumlah desa wisata yang cukup tinggi yaitu sebanyak 225 desa dan jumlah desa wisata maju mencapai 9 desa. Namun, dominasi desa wisata dengan kategori rintisan dan berkembang masih jauh lebih besar di wilayah ini.

Tabel 1.3
Jumlah Desa Wisata Berdasarkan Status Perkembangan pada
Borobudur-Dieng Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rintisan	Berkembang	Maju
KSPP Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota	20	10	4
KSPP Prambanan–Klaten Kota	21	9	4
KSPP Merapi–Merbabu	10	7	1
KSPP Dieng	9	4	1
KPPP Purworejo	5	4	-
KPPP Kledung Pass	19	3	-
JUMLAH	182	36	10

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah , 2023)

Di antara wilayah yang tergabung dalam wilayah DPP Borobudur–Dieng, KSPP Prambanan–Klaten Kota memiliki jumlah desa wisata terbanyak kedua setelah KSPP Borobudur–Mendut–Pawon, yaitu 34 desa wisata yang terdiri dari 21 desa rintisan, 9 berkembang, dan hanya 4 desa yang tergolong maju. Proporsi desa rintisan yang mencapai 61,8%. masih menunjukkan bahwa mayoritas desa

wisata di Kabupaten Klaten masih berada pada tahap awal pengembangan desa wisata.

Kabupaten Klaten terletak di Jawa Tengah dengan posisi yang cukup strategis didukung dengan keberagaman pariwisata dan budaya yang potensial memberikan peluang untuk dapat mengembangkan potensinya, terkhusus sektor pariwisata. Pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pembangunan pariwisata dapat berfungsi untuk menangani kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berusaha dan pemberdayaan kemampuan masyarakat. Kabupaten Klaten dalam usahanya mempromosikan desa wisatanya menggunakan website Jadesta (Jejaring Desa Wisata) yang dapat diakses melalui link <https://jadesta.com/desa/dpb/5>. Jadesta memberikan informasi terkait keberadaan desa wisata di Kabupaten Klaten yang dapat diakses publik untuk mengetahui mengenai wisata pedesaan yang ditawarkan pada wisatawan.

Tabel 1.4
Data Desa Wisata
Kabupaten Klaten

No	Desa Wisata	Kategori	Tahun Penetapan
1	Desa Ponggok	Maju	2020
2	Desa Jarum	Maju	2020
3	Desa Kebondalem Kidul	Maju	2020
4	Desa Bugisan	Maju	2020
5	Desa Janti	Maju	2020
6	Desa Ngerangan	Berkembang	2020
7	Desa Gununggajah	Berkembang	2020
8	Desa Ngrundul	Berkembang	2020
9	Desa Malangjiwan	Berkembang	2020
10	Desa Sidowayah	Berkembang	2021
11	Desa Krakitan	Rintisan	2021
12	Desa Pokak	Rintisan	2020
13	Desa Glagah	Rintisan	2021
14	Desa Tanjung	Rintisan	2021
15	Desa Jimbung	Rintisan	2021
16	Desa Karangnongko	Rintisan	2021
17	Desa Tegalmulyo	Rintisan	2020
18	Desa Tlogowatu	Rintisan	2020
19	Desa Nglinggi	Rintisan	2021
20	Desa Melikan	Rintisan	2020
21	Desa Balerante	Berkembang	2020
22	Desa Ngrundul	Berkembang	2020
23	Desa Sidowarno	Berkembang	2021
24	Desa Kranggan	Rintisan	2022
25	Desa Mranggen	Rintisan	2022
26	Desa Soropaten	Berkembang	2022
27	Desa Manjungan	Rintisan	2022
28	Desa Kupang	Rintisan	2022
29	Desa Pasung	Berkembang	2022
30	Desa Karangduren	Rintisan	2020
31	Desa Karangasem	Rintisan	2021
32	Desa Ngering	Rintisan	2020
33	Desa Kahuman	Rintisan	2020
34	Desa Kebonallas	Rintisan	2023

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah , 2023)

Desa Wisata Tegalmulyo ditetapkan oleh Bupati Klaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 556/245 tahun 2020. Desa ini ditetapkan sebagai desa wisata rintisan. Desa Wisata Tegalmulyo dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tegalmulyo yang bernaung dibawah Pemerintah Desa Tegalmulyo.

Desa Wisata Tegalmulyo yang terletak di Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang menyuguhkan beragam pesona keindahan alam. Didukung dengan suasana dan pemandangan alam yang asri, disertai kearifan lokal masyarakat setempat menjadikan desa ini memiliki daya tarik tersendiri. Kondisi tersebut mendorong munculnya minat untuk berkunjung ke desa tersebut, sehingga mulai berkembang menjadi Desa Wisata Tegalmulyo.

Desa Tegalmulyo memiliki kekayaan potensi wisata mencakup alam, buatan, dan kuliner, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Salah satu potensi utama Desa Tegalmulyo adalah wisata alam, yang ditunjukkan dengan keindahan lanskap wilayahnya serta keberadaan objek-objek menarik seperti Kampung Girpasang, Embung Tirta Mulya, Gua Jepang, dan Gua Dowo.

Selain itu, Kampung Girpasang menjadi daya tarik utama yang terletak di lembah curam dan hanya dapat diakses melalui jalur ekstrem. Untuk mendukung akses dan daya tariknya, dikembangkan pula potensi wisata buatan, seperti jembatan gantung dan gondola, yang dibangun untuk mempermudah akses ke Girpasang sekaligus menjadi atraksi unik bagi wisatawan. Selain itu, tersedia spot foto, *homestay*, dan *camping ground* yang dapat dinikmati wisatawan. Pada sisi

wisata kuliner, desa ini menawarkan makanan khas berbasis bahan lokal serta kopi hasil budidaya masyarakat yang mulai diperkenalkan melalui kedai-kedai di kawasan wisata. Potensi ini memperkuat daya tarik wisata sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, wisata budaya juga menjadi bagian dari kekayaan Desa Tegalmulyo, terutama dalam bentuk tradisi lokal dan nilai-nilai komunitas yang dijaga sebagai bagian dari identitas desa.

Desa Wisata Tegalmulyo telah ditetapkan sebagai desa wisata rintisan melalui Surat Keputusan Bupati sejak tahun 2020. Meskipun memiliki berbagai potensi wisata dan dikembangkan sejak tahun tersebut, hingga kini Desa Wisata Tegalmulyo masih tercatat sebagai desa wisata rintisan berdasarkan data Jejaring Desa Wisata (Jadesta). Menurut Kemenpankraf, desa wisata rintisan umumnya memiliki potensi untuk berkembang, walaupun sarana prasarana dan fasilitas wisata masih terbatas, serta tingkat kesadaran dari masyarakat desa mulai tumbuh karena dukungan pengelola desa wisata (Krisnawati, 2021). Namun, apabila mengacu pada indikator dalam Buku Pedoman Desa Wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019), Desa Wisata Tegalmulyo telah memenuhi kriteria menuju desa wisata berkembang.

Menurut Buku Pedoman Desa Wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019), desa wisata berkembang sudah menunjukkan kemajuan, biasanya sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan, baik masyarakat sekitar maupun luar daerah, terdapat upaya pengembangan sarana dan prasarana, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat, dan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh. Hal tersebut dapat

dilihat dari Desa Wisata Tegalmulyo mulai dikenal sebagai destinasi alam di lereng Merapi dan ada peningkatan jumlah kunjungan. Pengelolaan wisata telah memunculkan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk terdapat *cafe* atau usaha kuliner, penerapan tarif tiket, *homestay*, glamping dan *camping ground*. Hal ini sejalan dengan temuan Kezia Friska Octaviari dan Fulia Aji Gustaman (2023), yang menyatakan bahwa di Desa Wisata Tegalmulyo sektor pariwisata mendorong masyarakat beralih profesi menjadi pelaku UMKM dan mengelola kafe serta tempat camping. Walaupun demikian, hingga saat ini belum ada perbaruan status desa wisata secara administratif yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perkembangan lapangan dan pengakuan formal.

Masyarakat dapat memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki sebagai sumber penghasilan alternatif untuk meningkatkan perekonomian secara merata dan berkelanjutan. Dalam Roadmap Pengembangan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2023), pendekatan pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo justru berbasis pada sektor budaya dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini kurang mampu mencerminkan potensi utama desa yang terletak pada wisata alam.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan desa wisata bertujuan untuk memberikan daya dan menjadi usaha dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah tersebut melalui pengelolaan potensi lokal yang dimiliki (Noviana et al., 2023). Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang menyatakan bahwa pembangunan destinasi pariwisata, termasuk desa wisata, salah satunya

meliputi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hutomo dalam Wahyuningsih & Pradana (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi menjadi beberapa kategori kegiatan, seperti pemberian bantuan modal, bantuan untuk pembangunan fasilitas, bantuan pendampingan/pelatihan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo telah dilakukan dengan memanfaatkan obyek wisata dan potensi lokal untuk mendorong partisipasi masyarakat sehingga dapat mengambil keuntungan dari adanya desa wisata tersebut. Beberapa bentuk pemberdayaan tersebut telah mulai diterapkan di Desa Tegalmulyo, seperti pembukaan usaha kuliner dan *homestay*. Infrastruktur pendukung seperti gondola, jembatan gantung, dan spot foto juga telah dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata yang dikelola oleh masyarakat melalui Pokdarwis. Meskipun pemberdayaan telah dilakukan, Desa Wisata Tegalmulyo masih menghadapi beberapa masalah.

Tabel 1.5
Fluktuasi Jumlah Wisatawan (Jiwa) di Desa Wisata Tegalmulyo

Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan (Jiwa)
2022	187.507
2023	73.070
2024	13.970
Total	274.547

(Sumber: Pokdarwis Desa Tegalmulyo, 2024)

Desa Wisata Tegalmulyo mengalami adanya tren penurunan dalam jumlah wisatawan. Berdasarkan data Pokdarwis jumlah wisatawan Desa Wisata

Tegalmulyo pada tahun 2022 hingga bulan Mei 2024 mencapai 274.547 wisawatan. Jumlah wisatawan Desa Wisata Tegalmulyo pada tahun 2022 mencapai 187.507 wisatawan. Namun, jumlah wisatawan Desa Wisata Tegalmulyo mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 dengan jumlah 73.070 wisatawan. Hingga pada tahun 2024 per bulan Mei, jumlah wisatawan yang telah mengunjungi Desa Wisata Tegalmulyo hanya dapat mencapai 13.790 wisatawan.

Tabel 1.6

Data Postingan Promosi Digital Media Sosial Instagram dan Tiktok

Desa Wisata Tegalmulyo Tahun 2023-2024

No.	Media Sosial	Jumlah Postingan	
		2023	2024
1	Instagram	44	11
2	Tiktok	4	-
TOTAL		48	2

(Sumber: Media sosial Instagram & Tiktok Desa Wisata Tegalmulyo, 2024)

Desa Wisata Tegalmulyo telah memiliki media sosial *Instagram* dengan akun @wisatategalmulyo dengan 330 pengikut dan akun *Tiktok* @wisata.tegalmulyo yang baru saja dibuat pada tahun 2023 sebagai upaya mempromosikan potensi wisatanya. Namun, jika melihat dari waktu pembuatannya pembuatan, upaya ini tergolong terlambat karena mengingat desa wisata ini telah ditetapkan secara resmi sejak tahun 2020. Pemasaran digital melalui media sosial belum dilakukan secara konsisten sehingga potensi wisata belum dikenal secara luas. Media sosial Instagram sempat aktif pada tahun 2023 mengunggah 44 konten dan pada 2024 hanya menampilkan dua unggahan saja. Sedangkan, pada media sosial TikTok hanya memuat empat unggahan dan tidak mengalami pembaruan

sama sekali hingga kini. Buku Pedoman Desa Wisata (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019) menyarankan penggunaan berbagai platform media sosial yang disesuaikan dengan segmentasi usia dan minat wisatawan. Instagram, misalnya untuk menyasar wisatawan muda dengan konten visual berupa atraksi alam yang estetik. Namun, Desa Wisata Tegalmulyo belum menunjukkan pemanfaatan media sosial, serta aktivitas pada kedua akun media sosial tersebut masih sangat terbatas dan belum dikelola secara konsisten. Media sosial Instagram sempat aktif pada tahun 2023 mengunggah 44 konten dan pada 2024 hanya menampilkan dua unggahan saja. Sedangkan, pada media sosial TikTok hanya memuat empat unggahan dan tidak mengalami pembaruan sama sekali hingga kini. Media sosial bukan hanya berfungsi sebagai saran informasi, tetapi juga sebagai alat utama dalam membangun citra destinasi dan menjangkau wisatawan baru. Minimnya jumlah konten serta belum adanya strategi yang jelas dalam segmentasi media sosial menunjukkan bahwa promosi digital belum dilakukan dengan konsisten sehingga dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan karena keberadaan desa wisata di ruang digital menjadi kurang terlihat maka pengkapasitasan dalam pemasaran digital perlu diperhatikan agar pengembangan desa wisata dapat mendukung proses pemberdayaan masyarakat.

Sebagai desa wisata rintisan, Desa Wisata Tegalmulyo masih berupaya untuk mengembangkan potensi wisatanya, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam proses pemanfaatan potensi lokal. Upaya ini diharapkan mampu mendorong kemajuan desa wisata, serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam

pembangunan berbasis pariwisata. Masyarakat lokal memegang peran penting dalam proses pengembangan desa wisata karena mereka memiliki kendali atas pengambilan keputusan, mengingat bahwa masyarakat menjadi pihak yang secara langsung akan merasakan dampak, baik dari keberhasilan maupun kegagalan, dari setiap langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (Wahyuningsih & Pradana, 2021).

Namun, dalam praktiknya, belum semua desa wisata mampu mewujudkan partisipasi masyarakat secara merata, terutama terjadi pada desa wisata yang masih berstatus rintisan, seperti Desa Wisata Tegalmulyo. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan karena proses pemberdayaan tidak bisa berhasil dengan sendirinya. Dalam pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo masih ditemukan adanya kekurangan atau tantangan berdasarkan fakta yang telah diuraikan. Berdasarkan pemaparan di atas, memunculkan pertanyaan penelitian “bagaimana proses pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo?” Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai **“Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ketimpangan antara status administratif Desa Wisata Tegalmulyo sebagai desa wisata rintisan dengan perkembangan di lapangan.
2. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

3. Rendahnya intensitas dan konsistensi dalam melakukan pemasaran.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat Desa Tegalmulyo melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten?
2. Apa faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Tegalmulyo melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
2. Menjelaskan serta menjabarkan faktor penghambat proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi yang membantu pengembangan teori dan kontribusi ilmiah pada kajian dalam melakukan analisis mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Penelitian dapat menjadi bahan dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas, baik potensi pariwisata maupun sumber daya manusia yang dimiliki, untuk mendayakan

individu/kelompok sehingga mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang didapatkan dan membantu dalam melakukan analisis mengenai permasalahan sosial yang ada, terkhusus yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, serta menjadi pendorong bagi peneliti memperluas pengetahuan dengan penemuan informasi terbaru.
2. Bagi perguruan tinggi negeri. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan materi rujukan dan pengetahuan terkait pelaksanaan tahapan proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.
3. Bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan kesadaran atau memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata, serta agar masyarakat dapat menyampaikan ide maupun aspiranya mengenai inovasi bagi program pemberdayaan.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai sumber literatur dalam melaksanakan penelitian sehingga mampu memperbanyak teori dalam mengkaji penelitian yang dilaksanakan. Penelitian oleh Aldivon. A. P. Santoso (2022) berjudul

“Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah” bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat dengan program Desa Wisata di Kelurahan Kandri. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang terdiri atas tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program desa wisata di Kelurahan Kandri tergolong berhasil dalam memberdayakan masyarakat. Upaya pemberdayaan telah dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan SDM, serta penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Namun, masih ada kekurangan yaitu pada pendanaan dan promosi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti karena membahas pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata menggunakan teori dan metode penelitian yang sama, sedangkan perbedaannya adalah lokus penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad F. Kurniadin dan Wawanudin (2024) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata Gunung Dago di Desa Dago Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor” bermaksud untuk menganalisis dan mengidentifikasi wisata alam di Desa Dago dalam rangka membentuk pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta mengevaluasi usaha pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Gunung Dago. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori

tahapan pemberdayaan masyarakat oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) yang terdiri atas tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wisata Gunung Dago telah berdampak positif dalam ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melakukan studi banding dan pelatihan, terlibat sebagai pengurus pengelola Wisata Gunung Dago, dan adanya kegiatan berdagang. Penelitian memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin diteliti karena membahas pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dengan menggunakan teori dan metode penelitian yang sama, perbedaannya adalah lokus penelitian.

Wiwik Meilani, Budi Widayanto, dan Heni H. Utami (2022) melakukan penelitian “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Kampung Flory di Kabupaten Sleman” bermaksud untuk menganalisis pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa untuk membangun desa wisata, menelaah pengelolaan kegiatan yang terkait dengan pengembangan desa wisata, serta mengevaluasi proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kampung Flory. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat paham perlu memanfaatkan lahan Tlogoadi dan Kali Mbedog sebagai obyek wisata. tahap penyadaran dilaksanakan melalui pertemuan oleh Kelompok Taruna Tani bersama dengan masyarakat; pengkapasitasan dilakukan dengan memberikan keterampilan agar target terampil untuk mengelola desa wisata; serta, pemberian daya dilakukan Kelompok Taruna

Tani dengan memberikan kewenangan pada masyarakat untuk menjalankan tugas mereka. Namun, masih ada kekurangan seperti kurangnya semangat dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Masyarakat belum mencapai tahap kemandirian karena masyarakat masih tergantung dengan fasilitator. Penelitian memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin diteliti karena berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dengan menggunakan teori dan metode penelitian yang sama, perbedaannya pada lokus penelitian.

Penelitian oleh Rani Wahyuningsih dan Galih W. Pradana (2021) berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu” bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pemberdayaan masyarakat setempat desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Tim *Delivery* (dalam Mardikanto & Soebiato, 2017) yaitu tahap seleksi lokal, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan pemandirian masyarakat. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat Desa Hendrosari melalui pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu telah dilakukan. Pemberdayaan masyarakat Desa Hendrosari telah meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Kemandirian masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya kelompok yang diberdayakan, seperti Kelompok Petani Siwalan, UMKM Batik As-Salam, UMKM Pedagang, dan Cafe Lontar.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti karena berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dan menggunakan metode penelitian yang sama, walaupun teori yang digunakan berbeda.

Penelitian berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Mangga Klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombo Kulon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan” oleh Muhammad Afifudin dan Susi Hardjati (2024) memiliki tujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat BUMDes Mangga Klonal 21 di Desa Oro-Oro Ombo Kulon Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Tim *Delivery* (dalam Mardikanto & Soebiato, 2017) yaitu tahap seleksi lokal, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan pemandirian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan potensi desa belum berkembang sesuai yang diharapkan. Masih terdapat beberapa kekurangan dari pemberdayaan yang dilakukan, seperti upaya pemerintah desa belum berpengaruh membuat masyarakat berpartisipasi aktif, pemanfaatan media teknologi hanya dilakukan generasi muda, serta pelatihan dan pendampingan masih perlu *ditingkatkan*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti karena menggunakan metode penelitian yang sama, walaupun ada perbedaan teori yang dipakai sehingga

diharapkan memberikan sudut pandang terkait teori tahapan pemberdayaan yang lain.

Diva P. Putri dan Tri Suminar (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang” bertujuan untuk menjelaskan proses pemberdayaan masyarakat dengan berbasis potensi lokal, faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan, serta strategi untuk menangani hambatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Kokolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004) yang meliputi tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; transformasi kemampuan dan kecakapan; serta tahap pengayaan atau kemampuan intelektual. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Desa Wisata “Kampung Kokolaka” telah dilakukan. Namun, masih ada penghambat, seperti partisipasi masyarakat belum konsisten, maupun perbedaan pendapat atau komitmen. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu menggunakan metode penelitian yang sama, perbedaannya pada teori yang dipakai.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisnah, Dafyar Eliadi H., dan Edi Mulyadi (2023) berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Program Pelatihan Dan Pendampingan Usaha Di Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang” memiliki tujuan untuk menganalisis pemberdayaan komunitas UMKM melalui program pelatihan dan

pendampingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2017) mencakup penetapan dan pengenalan wilayah kerja, sosialisasi kegiatan, penyadaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, advokasi kebijakan, dan politisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pondok Bahar Kota Tangerang telah diupayakan oleh Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk menghadapi permasalahan yang ada seperti keterbatasan modal, kurangnya pembinaan dan pengembangan SDM dengan melakukan pemberdayaan melalui beberapa tahapan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin diteliti karena memakai metode penelitian yang sama, walaupun terdapat perbedaan teori yang dipakai.

Indarti Dewi Jayanti, Hardi Warsono, dan Herbasuki Nurcahyanto (2022) dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang” memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods* (kuantitatif-kualitatif). Teori yang digunakan untuk menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini yaitu teori menurut Mardikanto dan Soebiato yang mencakup keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, kebijakan pembangunan, serta organisasi dan administrasi pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan efektif yang didukung dengan keadaan sumber daya alam, kelembagaan, sarana prasarana, kebijakan pembangunan, serta organisasi dan administrasi. Namun, program pemberdayaan masyarakat masih terhambat karena keadaan sumber daya alam, berupa abrasi pantai dan sumber daya manusia, berupa tingkat pendidikan masyarakat dan kepatuhan akan regulasi masih rendah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin diteliti karena memakai teori untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang sama, perbedaannya penelitian ini menganalisis efektivitas program dan metode penelitian yang dipakai berbeda.

Penelitian mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Sronдол Kulon” oleh Rengganis Elok Briliani, Nina Widowati, dan Maesaroh (2024) bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik di Kelurahan Sronsol Kulon, serta faktor yang menghambat dan mendukungnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori dimensi keberhasilan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan. Sedangkan untuk menganalisis faktor pendukung meliputi sumber daya alam, sarana prasarana, dan kebijakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013), serta faktor penghambat mencakup terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan manajerial, dan tidak adanya kemampuan mengelola peluang oleh Arsiyah (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek akses dan partisipasi telah terpenuhi dan

mendukung pemberdayaan, namun aspek kontrol dan kesejahteraan belum terpenuhi karena kontrol tidak dilakukan tim pengawas, serta masyarakat belum merasakan adanya pertambahan dalam pendapatan secara signifikan maupun belum dengan mudah mengakses pendidikan atau kesehatan. Faktor yang mendukung pemberdayaan yaitu sumber daya alam, sedangkan yang menghambat mencakup faktor keterbatasan dari kemampuan manajer dan kemampuan mengelola pasar.

Penelitian oleh Hanafi H. Susanto (2021) mengenai “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo” bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat ketertinggalan mental di Kampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis faktor penghambat dalam penelitian ini oleh Arsiyah (2009) meliputi faktor internal antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya kemampuan manajerial, tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada, dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki, sedangkan faktor eksternal meliputi akses menuju lokasi dari perkotaan sangat jauh, belum ada pihak swasta lain yang fokus mengelola bantuan modal usaha sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan telah berhasil melalui program harian berupa usaha membuat kerajinan keset, program mingguan berupa membuat batik ciprat, program bulanan berupa adanya peternakan ayam kampung, dan program tiga bulanan berupa adanya peternakan lele.

Walaupun masih ada faktor yang menghambat yaitu adanya kesulitan untuk mendistribusikan hasil karya para tunagrahita, terutama keset. Penelitian ini memberikan pandangan lain terkait faktor penghambat yang kemungkinan dapat terjadi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Definisi

Administrasi publik dalam pandangan Chandler dan Plano dalam Keban (2014) adalah suatu proses yang mengarahkan dan mengkoordinir sumber daya manusia untuk dapat melakukan formulasi, implementasi, dan pengelolaan keputusan publik. Administrasi publik berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah. McCurdy (1986) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai proses politik yang menjadi salah satu metode pemerintahan suatu negara dan cara yang prinsipil dalam melaksanakan fungsi negara. Caiden dalam Rahadi & Muslih (2019) juga berpendapat bahwa administrasi publik adalah fungsi dalam pembentukan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan sasaran, penyelenggaraan kerja sama dengan organisasi lain untuk mendapat dukungan dari masyarakat bagi program pemerintahan. Menurut Waluyo dalam Kadarisman et al., (2021), administrasi publik adalah bentuk organisasi dan administrasi unit-unit organisasi dengan keinginan mencapai tujuan kenegaraan, termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang publik dan pelayanan publik yang dilakukan oleh para birokrat.

Waluyo dalam Kadarisman et al., (2021) berpendapat bahwa administrasi publik terdiri dari seluruh kegiatan negara untuk melaksanakan kebijakan negara.

Administrasi publik menjadi bentuk kegiatan manajemen oleh pemerintah terkait perumusan hingga evaluasi dari kebijakan publik yang diputuskan. Istilah dalam administrasi publik yaitu “*administration by public*” adalah suatu konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberikan/memfasilitasi peluang tersebut (Keban, 2014). Ruang lingkup administrasi publik oleh Henry dalam Keban (2014) terdiri dari organisasi publik, manajemen publik, dan implementasi. Keban (2014) mengemukakan bahwa administrasi publik harus dilihat dari 6 (enam) dimensi strategis meliputi dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi etika, dimensi lingkungan, dan dimensi akuntabilitas.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Seiring dengan terjadinya perubahan zaman dalam perkembangan paradigma administrasi publik telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik – Administrasi

Paradigma ini ada pada 1990-1926. Paradigma dikotomi politik - administrasi merupakan perpisahan kepentingan politik dari administrasi dalam fungsi utama dan substansi pemerintah dalam sistem birokrasi pemerintah yang menitikberatkan pada lokus di mana administrasi publik seharusnya diposisikan. Paradigma ini menitikberatkan administrasi publik menjadi ilmu pengetahuan yang bebas nilai untuk mewujudkan nilai ekonomis, dan efisiensi dari birokrasi pemerintah (Anwaruddin, 2004). Administrasi publik harus dipusatkan pada birokrasi pemerintah. Paradigma

ini hanya menekankan pada aspek “lokus” yaitu birokrasi pemerintahan, bukan pada fokus yang harus dikembangkan dalam administrasi publik (Keban, 2014).

2. Prinsip – Prinsip Administrasi

Paradigma prinsip-prinsip Administrasi ada pada tahun 1927-1937 yang lebih memperhatikan fokus dibandingkan dengan lokus (Anwaruddin, 2004). Prinsip-prinsip dikenalkan sebagai fokus administrasi publik yang dituangkan dalam POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*). Paradigma ini memandang administrasi publik bersifat universal dan dapat diimplementasikan ke seluruh tatanan administrasi tanpa adanya kepedulian tentang misi, fungsi, atau kebudayaan. Lokus administrasi publik tidak pernah diutarakan secara jelas maka prinsip-prinsip tersebut dianggap mampu berlaku dimana saja, termasuk organisasi pemerintah (Keban, 2014)

3. Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik

Paradigma ini ada pada tahun 1950-1970. Paradigma ini muncul karena kritik terhadap inkonsistensi dari prinsip-prinsip administrasi negara yang dinilai tidak bersifat universal atau bebas nilai, namun dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Administrasi publik dianggap sebagai ilmu politik yang lokusnya yaitu birokrasi pemerintah, sedangkan fokus tidak jelas diakibatkan prinsip memiliki banyak kelemahan (Keban, 2014). Paradigma ini kembali pada upaya untuk menghidupkan ikatan antara administrasi publik dan ilmu politik karena administrasi publik membantu pemimpin

politik melaksanakan tugas kenegaraannya secara efektif dan efisien (Anwaruddin, 2004). Ilmu politik sangat dominan dalam administrasi publik untuk pelaksanaan tugas sehingga terjadi krisis identitas.

4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi

Paradigma ini ada pada tahun 1956-1970. Administrasi publik memakai paradigma ilmu administrasi yang membangun interpretasi sosial psikologis dan analisa sistem. Dalam paradigma ini berkembang dua arah yaitu yang berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi dengan dukung psikologi sosial dan berorientasi pada kebijakan publik (Keban, 2014). Paradigma ini lebih mementingkan focus, sedangkan lokus yang hanya suatu persyaratan menjadi tidak jelas (Anwaruddin, 2004). Ilmu administrasi sebagai suatu paradigma tidak dapat memahami nilai lebih kepentingan umum.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Paradigma ini ada pada tahun 1970-sekarang. Dalam paradigma ini lokus dan fokus ilmu administrasi publik sudah terlihat jelas. Fokusnya meliputi teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya meliputi permasalahan dan kepentingan publik (Keban, 2014). Fokusnya berkembang pada teori administrasi yang mementingkan bagaimana suatu organisasi seharusnya berjalan, berperilaku dan mengambil keputusan (Anwaruddin, 2004). Pada paradigma ini ada perpindahan dari model administrasi publik klasik ke NPM yaitu pergeseran paradigma untuk memakai sektor swasta atau manajemen sektor publik

berpindah ke arah sektor swasta. Model ini kemudian dikenal sebagai “*governance*” (Astuti et al., 2020).

6. Paradigma Governance (1990-Sekarang)

Konsep paradigma ini yang muncul pada akhir tahun 1990. *Governance* menurut Tamagoya dalam Ikeanyibe et al. (2017) diartikan sebagai penyelenggaraan kekuasaan atau otoritas oleh para penguasa politik untuk kesejahteraan rakyat. Pada beberapa sektor, masyarakat mengontrol dan menetapkan kebijakan publik yang berdampak pada manusia dan institusi. Paradigma ini lebih berfokus kepada usaha yang mengorganisasikan, menggambarkan, atau membentuk organisasi yang berjalan dengan menerapkan nilai – nilai kemanusiaan, serta membutuhkan partisipasi masyarakat untuk pelayanan merata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Paradigma *governance* dinilai berkaitan dengan NPM (*New Public Management*). Paradigma *governance* pada dasarnya melibatkan adanya kemitraan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta (Gibson dalam Astuti et al., 2020).

Penelitian ini menekankan pada paradigma keenam, yaitu paradigma *Governance*. Paradigma *governance*, terutama *good governance* merujuk pada pengelolaan pemerintah dengan melibatkan *stakeholders* yang meliputi pemerintah, masyarakat, maupun swasta (Djumadi et al., 2018). Paradigma *governance* memiliki esensi memperkuat interaksi yang terjadi antara ketiga aktor tersebut untuk mengenalkan konsep “*people centered*”

development” (Chema dalam Keban, 2014). Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan manusia menjadi pendekatan pembangunan yang berfokus pada rakyat untuk mendorong kemauan dan partisipasi masyarakat. Paradigma dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dalam hal pembangunan, terutama pembangunan masyarakat yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”* (Chambers dalam Mardikanto & Soebiato, 2017).

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cabang studi yang mempelajari berbagai aspek umum dari organisasi yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan elemen-elemen lain seperti sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik (Keban, 2014). Overman dalam Keban (2014) menyatakan bahwa manajemen publik bukanlah *“scientific management”* walaupun sangat dipengaruhi oleh pendekatan tersebut. Manajemen publik bukan *“policy analysis”* maupun *“administrasi publik baru.”* Manajemen publik mencerminkan ketegangan antara orientasi rasional-instrumental di satu pihak dan orientasi politik di pihak lain. Wilson dalam Keban (2014) mengemukakan adanya 4 (empat) prinsip bagi Administrasi Publik yang mewarnai manajemen publik yaitu (a) pemerintah sebagai konteks utama organisasi; (2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama; (3) pencarian prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci untuk mengembangkan kompetensi administrasi; dan (4) metode perbandingan sebagai pendekatan dalam mengembangkan bidang administrasi publik. Manajemen publik berfokus sebagai

suatu profesi dan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik lebih memfokuskan pada operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah maupun organisasi *non-profit*, dibandingkan pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, peradilan, dan organisasi sektor lain (Ott dkk, dalam Herawati & Widowati, 2021).

1.6.4 Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan dalam pandangan George F. Gant dalam (Listyaningsih, 2014) adalah suatu penyempurnaan birokrasi (aparatur pemerintah) dalam menghadapi peningkatan jumlah, jenis, dan kompleksitas dari fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Administrasi pembangunan terkait dengan kebijaksanaan, program, maupun proyek yang mendukung tujuan dari pembangunan. Fred W. Riggs (1986) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mengacu pada berbagai upaya yang disusun untuk menjalankan program maupun proyek terkait untuk mencapai sasaran pembangunan. Administrasi pembangunan bukan hanya sebagai upaya pemerintah untuk menjalankan program yang terencana untuk membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, namun berarti pula sebagai perjuangan untuk memperkuat kemampuan dalam menjalankan berbagai program yang ada. Administrasi pembangunan berarti suatu administrasi sebagai upaya pembentukan sosial ekonomi yang dinamis dan inovatif, serta adanya usaha untuk merubah aspek - aspek kehidupan masyarakat melalui pengalokasian sumber daya untuk kegiatan pembangunan (Bintoro Tjokroadmidjojo dalam Setiawan, 2019).

Perkembangan administrasi pembangunan terjadi karena kebutuhan dari negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga maupun pranata sosial, politik, dan ekonomi, serta ilmunya berkembang mengikuti studi administrasi, terkhusus administrasi negara dan studi pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian (2014) administrasi pembangunan mencakup dua konsep yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi berarti seluruh proses penyelenggaraan keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam pencapaian tujuan. Pembangunan yaitu serangkaian kegiatan untuk mengembangkan dan merubah secara terencana yang perlu ditempuh suatu negara untuk menuju modernitas. Administrasi pembangunan merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan suatu negara secara sadar dan terencana untuk bertumbuh dan berkembang dalam segala segi kehidupan negara untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Ciri pokok administrasi pembangunan menurut Bintoro Tjokroadmidjojo (1995:11) terdiri atas orientasi administrasi pembangunan terarah pada upaya perubahan kondisi yang lebih baik serta pendekatan administrasi pembangunan berupaya merubah dan menyempurnakan administrasi yang dikaitkan dengan perkembangan bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Bintoro Tjokroadmidjojo (1995:14), mengemukakan bahwa administrasi pembangunan memiliki dua fungsi yaitu: (1) penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administration*) mencakup upaya penyempurnaan organisasi, kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, dan sarana administrasi; (2) penyempurnaan administrasi pendukung perumusan dan penyelenggaraan

kebijakan dan program pembangunan secara efektif (*the administration of development process*). Pembangunan manusia sebagai konsep dengan pemikiran yang menyeluruh mengandung 4 (empat) unsur penting, yaitu peningkatan produktivitas, peluang yang merata, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan manusia (Kartamasita, 1997).

1.6.5 Teori Pembangunan

Korten dalam Kartamasita (1997) mengemukakan bahwa era pasca industri menghadapi adanya keadaan yang sangat berbeda dari keadaan di era industri dan perlu menyajikan potensi-potensi baru yang penting untuk memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan, serta kelestarian pembangunan. Melalui pendapat Korten tersebut kemudian muncul teori baru yang disebut teori pembangunan berpusat pada rakyat (*people center development*) yang menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi atau penguatan negara. Teori tersebut juga dikenal sebagai *Alternative Development Theory* (Mardikanto & Soebiato, 2017). Pembangunan yang berkeadilan perlu berfokus pada pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan mempertimbangkan prakarsa dari rakyat dan keaslian suatu daerah.

Ginandjar Kartamasita (1997) menyatakan pembangunan sebagai proses perubahan menuju lebih baik dengan melakukan usaha yang terencana. Pembangunan merupakan pembaharuan, yaitu sebagai suatu wujud perubahan ke arah yang dikehendaki, namun lebih berkaitan dengan nilai atau sistem nilai. Katz dalam Rakhmat (2013) berpendapat bahwa pembangunan berarti perubahan yang

terlaksana secara luas dalam masyarakat, bukan hanya dalam sektor ekonomi, namun meliputi perubahan di bidang politik dan sosial yang masalahnya terhubung satu sama lain. Pembangunan menurut Bryant dan White dalam Rakhmat (2013) sebagai suatu peningkatan kapasitas yang berpengaruh pada masa depan masyarakat, yang mengandung tiga arti: (1) pembangunan untuk memberi perhatian pada kapasitas yang harus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan/menciptakan perubahan; (2) pembangunan meliputi keadilan atau pemerataan; (3) dalam pembangunan ada penumbuhan kekuatan untuk menerima dan mengelola manfaat pembangunan.

Menurut Tjokroaminoto dan Mustopadidjaja dalam Rakhmat (2013), pendekatan pembangunan yang sebaiknya dilakukan negara berkembang yaitu pendekatan pembangunan bangsa (*nation building*) meliputi pembangunan politik dan sosial budaya, serta pendekatan pembangunan ekonomi (*economics development*). Tujuan dari pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat sejahtera dalam setiap aspek kehidupan yang akan masih tetap berlaku tanpa batas waktu pencapaian seiring dengan berkembangnya konsep kesejahteraan masyarakat. pembangunan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensinya harus diawasi pelaksanaan dan berkesinambungan, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, dan *feedback* atas keseluruhan proses tersebut (Anggara & Sumantri, 2016).

1.6.6 Manajemen Pembangunan

Ginandjar Kartamasita (1997) mengemukakan bahwa dalam ilmu administrasi pembangunan terdapat dua pengertian yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi itu sendiri. Untuk menerangkan administrasi bagi pembangunan digunakan pendekatan manajemen sehingga pada dasarnya masalah dari administrasi bagi pembangunan menjadi masalah manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan merupakan manajemen publik dengan ciri khas. Dalam analisis manajemen pembangunan dikenal ada beberapa fungsi nyata mencakup perencanaan, pengarahan sumber daya, menggerakkan partisipasi, penganggaran, penyelenggaraan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan yang dilengkapi dengan peran informasi (Kartamasita, 1997). Manajemen pembangunan memiliki beberapa tugas untuk menjamin pembangunan harus menguntungkan masyarakat, harus dipahami maksudnya oleh masyarakat, harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan melaksanakan pembangunan sesuai tujuan, secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen pembangunan untuk menuntun, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian berkembanglah konsep pemberdayaan masyarakat yang pada dasarnya memandirikan dan memampukan masyarakat (Kartamasita, 1997:57).

Manajemen pembangunan menjadi inovasi baru dari administrasi pembangunan. Manajemen awalnya hanya digunakan oleh sektor swasta, namun

seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan istilah manajemen diadopsi oleh sektor publik sehingga muncul istilah manajemen pembangunan. Konsep manajemen pembangunan adalah suatu perspektif dan istilah lain dari konsep administrasi pembangunan karena adanya peran administrasi untuk menciptakan pembangunan (Bryant dan White dalam Rakhmat, 2013). Manajemen pembangunan merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai peran manajemen publik dalam proses pembangunan nasional (Rakhmat, 2013). Walaupun studi manajemen mengalami banyak perkembangan, tetapi teori dasarnya tidak pernah berubah termasuk dengan kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.6.7 Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan atau "*empowerment*" sebagai konsep alternatif pembangunan menekankan pada otonomi untuk pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat berdasarkan pada sumber daya pribadi, partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan merupakan suatu proses atau mekanisme yang individu, organisasi, dan masyarakat menjadi ahli dalam mengatasi masalah yang dimiliki. Friedman dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) berpendapat bahwa konsep "*empowerment*" timbul karena adanya kegagalan dan harapan. Kegagalan berarti gagalnya model pembangunan ekonomi untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta harapan yang timbul akibat

adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai demokrasi, persamaan, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Pemberdayaan menurut Rappaport (1984) merupakan suatu langkah yang mengarahkan rakyat, komunitas, dan organisasi untuk dapat menguasai kehidupannya sendiri. World Bank dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) mengemukakan bahwa pemberdayaan berarti sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan pada masyarakat untuk berdaya dan berani bersuara atau menyuarakan ide, pendapat, atau gagasannya, serta keberanian untuk memilih suatu hal yang terbaik bagi pribadi, keluarga, masyarakat. Menurut Dhal dalam Mardikanto dan Soebiato (2017), pemberdayaan dari kata “*empowerment*” yang berkaitan erat dengan kekuasaan atau kekuatan (*power*).

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, melainkan juga terkait dengan pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, maupun tanggung jawab yang menjadi pokok dari upaya pemberdayaan (Mardikanto & Soebiato, 2017). Pemberdayaan menjadi usaha untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong dan memotivasi untuk membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki, serta upaya untuk pengembangan potensi tersebut. Pemberdayaan sebagai upaya masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar, untuk perbaikan kehidupannya berdasarkan daya mereka sendiri atau menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama dan menghindari manipulasi pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat

(Mardikanto & Soebiato, 2017). Pemberdayaan mengacu pada kemandirian masyarakat yang menganggap partisipasi masyarakat menjadi penting.

1.6.8 Pemberdayaan Masyarakat

1.6.8.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) adalah suatu proses aktif yang terjadi pada motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemberian peluang dalam mencapai akses sumber daya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) juga mengemukakan bahwa dalam pemberdayaan bukan hanya tentang ekonomi, namun mengandung makna penegakan demokrasi ekonomi yang berarti kedaulatan rakyat terkait perekonomian rakyat. Pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai sosial (*social value*), berpusat pada peran dan partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat miskin (*participary people centered*) dalam rangka memberi dan memperkuat daya (*empowering*) bagi masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Pemberdayaan masyarakat menjadi isu sentral dari pembangunan dalam pembangunan yang muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum bisa diselesaikan, terutama antara masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang, padahal pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan semakin meningkat. Pemberdayaan pada hakikatnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan aktor utama pembangunan (*people centered development*).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) juga menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat jika harus berhadapan dengan struktur sosial.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat martabat kelompok masyarakat yang saat ini tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan (Mardikanto & Soebiato, 2017). Lyons et al., dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan pemberdayaan masyarakat sebagai proses yang dilakukan agar masyarakat mampu mendapatkan kendali lebih besar dan peningkatan inisiatif yang berkaitan dengan urusan/masalah yang dimiliki. Proses pemberdayaan masyarakat adalah usaha yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial, dan ekologi (Subejo dan Narimo dalam Mardikanto & Soebiato, 2017). Kristiadi dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat harus dapat membuat masyarakat menjadi swadiri (dapat mengurus diri sendiri), swadana (mampu membiayai keperluan pribadi), dan swasembada (dapat memenuhi keperluan sendiri dengan keberlanjutan). Keberdayaan masyarakat menjadi unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bisa bertahan dalam mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

1.6.8.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tahapan yang bisa digunakan untuk menganalisis manfaat/efektivitas dari kegiatan

pemberdayaan, serta tahapan perlu dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kondisi, kapasitas, potensi, dan respon masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai suatu “proses yang menjadi” dan bukan instan, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat memiliki tiga tahapan, yaitu:

- 1) Penyadaran

Dalam tahap ini masyarakat sebagai target pemberdayaan diberikan “pencerahan” atau penyadaran bahwa masyarakat memiliki hak atas “sesuatu.” Masyarakat diberikan pemahaman bahwa bisa menjadi berada dan dapat terjadi jika masyarakat memiliki kapasitas untuk keluar dari ketertinggalan. Pada tahap ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat paham bahwa perlu (membangun) untuk diberdayakan yang dimulai dari diri sendiri.

- 2) Pengkapasitasan

Sebelum diberikan daya atau kuasa, masyarakat harus memiliki kemampuan terlebih dulu. Masyarakat diberikan kapasitas sehingga mampu untuk menerima segala daya maupun kekuasaan yang akan diberikan. Pengembangan kemampuan atau keterampilan disesuaikan dengan kapasitas individu atau kelompok. Pengkapasitasan terdiri dari 3 jenis, mencakup manusia, organisasi, dan sistem nilai. Pengkapasitasan dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan, *workshop*, seminar, restrukturisasi organisasi, serta dibantu dalam pembuatan “aturan main.”

3) Pendayaan

Pada tahap ini masyarakat diberikan daya, kuasa, otoritas, atau peluang yang sesuai dengan kapasitas yang telah dimiliki. Pemberian daya pada masyarakat dilakukan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dari masyarakat dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap. Masyarakat dituntun dan diberikan ruang berekspresi atas aspirasinya, serta perlu dibimbing dalam mengevaluasi hasil kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan hidup masyarakat.

Tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Tim *Delivery* dalam Mardikanto & Soebiato (2017) dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:

1) Seleksi Lokasi/Wilayah

Tahapan seleksi dilakukan dengan menyesuaikan antara lokasi dan kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga, masyarakat, dan pihak terkait agar pemilihan lokasi dapat dilakukan dengan optimal sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai.

2) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan sosialisasi menjadi cara untuk membangun komunikasi tentang kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat. Sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder tentang program atau kegiatan pemberdayaan yang sudah direncanakan. Proses ini penting karena dapat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses ini masyarakat bekerja sama melaksanakan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi dari lokasi, permasalahan, dan peluang yang ada untuk memperoleh gambaran terkait aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
- b. Penyusunan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil analisis.
- c. Melakukan rencana kegiatan kelompok yang konkrit dengan memperhatikan realisasi dan target awal.
- d. Pemantauan terus menerus pada proses dan hasil kegiatan secara partisipatif.

4) Pemandirian Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan memandirikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga pemandirian dilakukan dengan mendampingi dalam persiapan masyarakat agar mampu mengelola kegiatannya sendiri. Dalam proses ini, ada keterlibatan pendampingan oleh tim fasilitator dengan berbagai keahlian. Peran fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan akan perlahan berhenti seiring kemandirian masyarakat yang meningkat.

Mardikanto & Soebiato (2017) mengemukakan ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1) Penetapan dan Pengenalan Wilayah Kerja

Penetapan wilayah kerja perlu ada kesepakatan antar tim fasilitator aparat pemerintah setempat, serta membangun sinergi dan mendapatkan dorongan berupa partisipasi.

2) Sosialisasi Kegiatan

Upaya untuk mengkomunikasikan kegiatan pemberdayaan pada masyarakat mencakup partisipasi, pembagian peran, pendekatan, strategi, dan langkah yang dilakukan.

3) Penyadaran Masyarakat

Dilaksanakan untuk menyadarkan masyarakat mengenai “keberadaannya.”

4) Pengorganisasian Masyarakat

Dilakukan dengan memilih pemimpin kelompok dalam *task group* sehingga nantinya bisa menghadapi munculnya masalah. Pengorganisasian termasuk dengan adanya pembagian peran dan pengembangan jejaring.

5) Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini dilakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan kegiatan dengan peningkatan pendapatan, pelestarian lingkungan hidup, dan efektivitas lembaga.

6) Advokasi Kebijakan

Seluruh kegiatan pemberdayaan perlu ada dukungan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga advokasi ini perlu untuk mendapatkan dukungan politik dan legitimasi elit masyarakat.

7) Politisasi

Politisasi dilakukan dengan pemeliharaan dan peningkatan posisi tawar-menawar melalui kegiatan politis praktis.

1.6.8.3 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat tersebut. Mardikanto dan Soebiato (2017) mengemukakan bahwa terdapat faktor yang dapat menghambat pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Kondisi sumber daya alam, sumber daya alam sebagai potensi atau kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Sumber daya alam berperan dalam menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- b. Kondisi sumber daya manusia, sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan yang memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sendiri. Partisipasi sumber daya manusia diperlukan dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sumber daya manusia dengan kreativitas, kemampuan belajar, dan

daya adaptasi yang dimiliki mampu menciptakan berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kualitas sumber daya manusia berperan dalam mendorong proses pemberdayaan agar dapat berjalan secara optimal.

- c. Kondisi kelembagaan, lembaga termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan badan swasta, berperan dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, serta memfasilitasi distribusi dana dan pembangunan infrastruktur. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya sinergi yang mendorong pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada kebutuhan lokal.
- d. Sarana dan prasarana, berperan dalam proses pemberdayaan dengan menyediakan aksesibilitas, mobilitas, dan fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan diri masyarakat. Sarana prasarana dapat menjadi penunjang bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya, memanfaatkan peluang, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

1.6.9 Desa Wisata

1.6.9.1 Definisi Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan suasana autentik pedesaan, meliputi tata ruang, arsitektur bangunan, serta pola kehidupan sosial budaya masyarakat maupun adat keseharian (Suwanto dalam Santoso,

2022). Wiendu dalam Septemuryanto (2021) menjelaskan desa wisata sebagai bentuk keterpaduan antara atraksi, akomodasi dan fasilitas penunjang, dihadirkan dalam sebuah struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan adat istiadat dan tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang. Daya tarik khas yang dimiliki desa wisata umumnya berbentuk keunikan alam pedesaan yang asri maupun kehidupan sosial bermasyarakat yang kaya akan budaya. Masyarakat desa wisata masih memegang teguh keyakinan untuk mempertahankan tradisi dan budaya yang masih asli untuk bisa dipelajari oleh para pengunjung.

Desa wisata adalah suatu lokasi yang mempunyai karakteristik dan nilai tertentu yang menjadi daya tarik khusus bagi pengunjung dengan ketertarikan pada kehidupan pedesaan yang tidak dapat ditemukan di perkotaan (Inskeep dalam Santoso, 2022). Desa wisata juga berpotensi dapat meningkatkan elemen pariwisata seperti atraksi, cinderamata, akomodasi, dan fasilitas penunjang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Nuryanti dalam Wahyuningsih dan Pradana (2021) bahwa desa wisata adalah kolaborasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang disajikan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang menyatu dengan tradisi yang ada hingga berkembang sebagai destinasi wisata. Desa wisata sebagai desa yang berpotensi dalam daya tarik wisata dan mempunyai keunikan khas meliputi kehidupan sosial budaya maupun kondisi fisik lingkungan pedesaan yang autentik dengan pengembangan fasilitas pendukung dalam suatu tata lingkungan yang terstruktur dan harmonis sehingga mampu menarik minat wisatawan dan mendorong aktivitas perekonomian

pariwisata yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

1.6.9.2 Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata sebagai salah satu perwujudan pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan dimanfaatkan sebagai peluang untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Pengembangan desa wisata menjadi langkah penting dalam peningkatan sektor pariwisata Indonesia (Nahar et al., 2024). Pengembangan desa wisata diharapkan akan membuat pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan desa wisata dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal yang digabungkan dengan desentralisasi daerah sehingga pemerintah dapat tetap berwenang atas pembangunan dan pengembangan daerah. Pengembangan desa wisata dengan kekayaan alamnya harus dimanfaatkan tanpa merusak suasana asri yang dimiliki desa. Kegiatan pengembangan desa wisata harus memegang teguh identitas kedaerahan yang menjadi khas kearifan lokal. Pengembangan desa wisata harus berdasar pada kondisi nyata dan daya dukung dengan tujuan menciptakan interaksi yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan pembangunan pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jubaedah & Fajarianto, 2021). Dalam Jubaedah dan Fajarianto (2021) pengembangan desa wisata berbasis lokal dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator, seperti pengembangan daya tarik dan ciri khas daerah; kemudahan akses lokasi; ketersediaan fasilitas umum yang memadai; partisipasi masyarakat dalam

kegiatan pemberdayaan sehingga tercipta kondisi saling menguntungkan dengan wisatawan; serta, promosi dan pemasaran dilakukan dengan terstruktur. Salah satu kunci kesuksesan dari pengembangan desa wisata adalah pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism/CBT*) yang mendorong masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan pariwisata untuk menyadari potensi dan siap mendapatkan manfaat dari desa wisata untuk kesejahteraan perekonomiannya (Nahar et al., 2024).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam Buku Pedoman Wisata (2019) membagi pengembangan desa wisata di Indonesia menjadi empat status utama. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk melihat kemajuan masing-masing desa wisata yang menjadi acuan dalam penyusunan program pengembangan yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Keempat status tersebut meliputi:

1. Desa Wisata Rintisan

Desa masih dalam tahap awal pengembangan, dengan potensi wisata yang belum dimanfaatkan optimal. Sarana pendukung terbatas, dan jumlah kunjungan wisatawan masih rendah. Kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata masih mulai tumbuh, sehingga pendampingan dari pihak luar masih sangat diperlukan.

2. Desa Wisata Berkembang

Desa mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah. Sarana dan prasarana pariwisata mulai tersedia, dan kegiatan ekonomi berbasis wisata mulai muncul. Masyarakat mulai

sadar akan potensi wisata, meskipun masih membutuhkan bimbingan dari pihak terkait.

3. **Desa Wisata Maju**

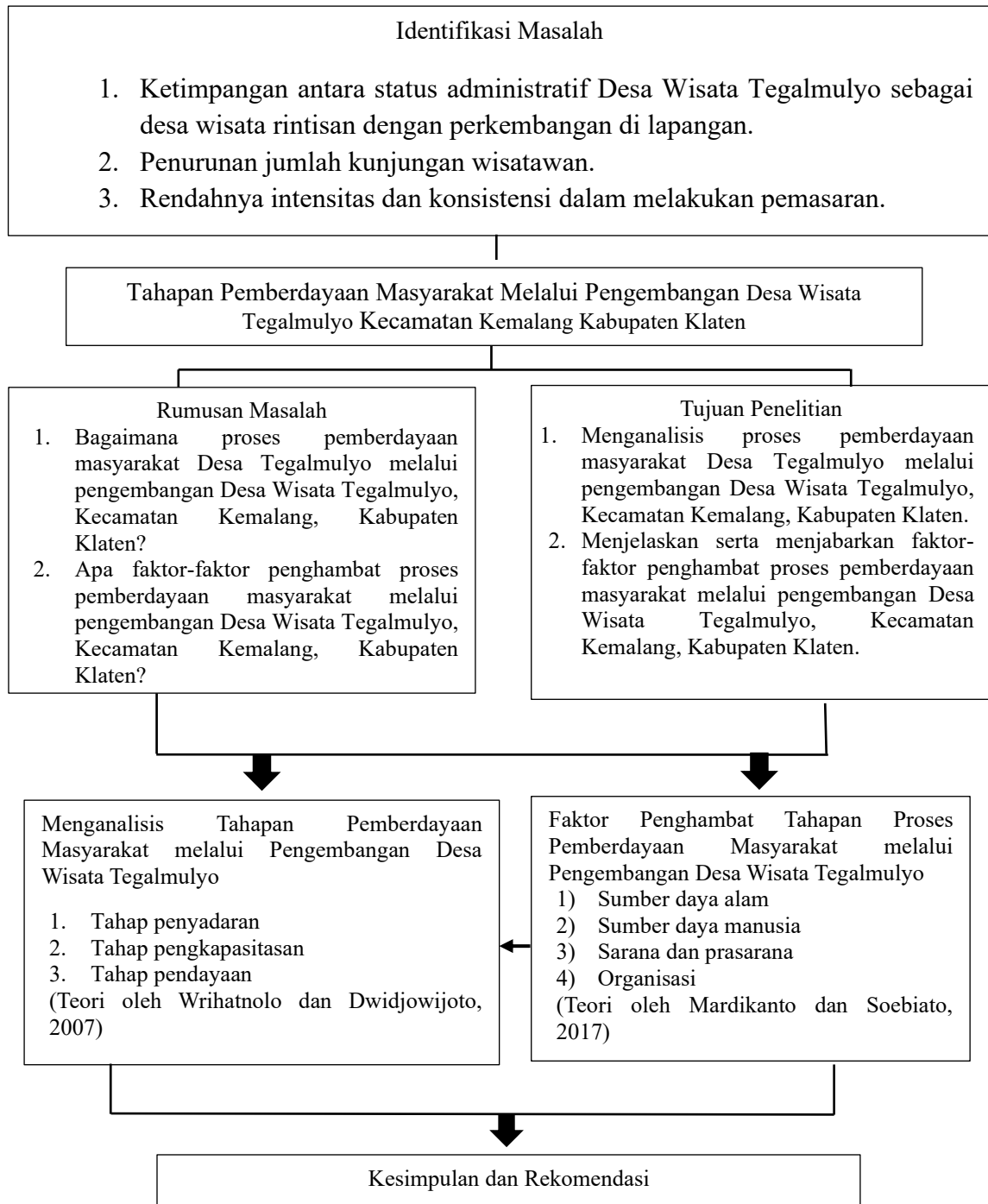
Masyarakat sudah aktif dan sadar penuh akan potensi wisata di desanya. Desa telah menjadi destinasi yang cukup dikenal, dengan fasilitas wisata yang memadai. Pengelolaan wisata sudah dijalankan oleh kelompok masyarakat secara mandiri, meskipun tetap menjalin kemitraan dengan pihak lain.

4. **Desa Wisata Mandiri**

Desa mampu melakukan inovasi dan pengembangan wisata secara mandiri. Masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi kreatif dan wirausaha berbasis pariwisata. Pelayanan sudah sesuai standar nasional dan internasional, serta promosi dan pemasaran dilakukan secara digital oleh masyarakat sendiri.

1.6.10 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Analisis Peneliti, 2024

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan masyarakat adalah proses memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta memberikan peluang untuk mewujudkan akses sumber daya bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata bertujuan untuk memberikan daya sehingga masyarakat memiliki kapasitas dalam mengelola potensi lokal, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, dan mengatasi ketidakberdayaan atau ketertinggalan yang dialami. Berikut konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1.7.1 Tahapan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai upaya dengan membagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menjadi beberapa konsep (tahapan), yaitu sebagai berikut:

1) Penyadaran

Upaya memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa berhak dan mampu untuk keluar dari ketidakberdayaan (ketertinggalan). Melalui penyadaran, masyarakat diberikan motivasi bahwa harus mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, mulai dari diri sendiri, yang dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya dengan optimal. Dalam hal ini gejala-gejala yang akan diamati, meliputi:

- a. Potensi dan sosialisasi program
- b. Respon masyarakat terhadap program

2) Pengkapasitasan

Upaya memampukan masyarakat dengan memberikan kapasitas agar masyarakat memiliki keterampilan terlebih dahulu sebelum diberikan daya atau peluang yang dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti pelatihan, *workshop*, seminar, atau restrukturisasi organisasi yang meliputi pengkapasitasan pada manusia, organisasi, dan sistem nilai.

Adapun gejala-gejala yang diamati, mencakup:

- a. Pengkapasitasan Manusia
- b. Pengkapasitasan Organisasi
- c. Pengkapasitasan Sistem Nilai

3) Pendayaan

Upaya memberikan peluang pada masyarakat sesuai kemampuan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui pemberian peran dan wadah aspirasi, serta dibimbing dalam melakukan evaluasi diri sehingga masyarakat mampu berdaya dan mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan. Gejala-gejala yang akan diamati dalam hal ini, meliputi:

- a. Keberjalanan wisata dan kecakapan masyarakat
- b. Bantuan modal

1.7.2 Faktor Penghambat Proses Pemberdayaan Masyarakat

Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dapat berupa faktor yang akan mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, yang menjadi konsep dalam hal ini, yaitu:

1) Sumber daya alam perlu dikenali keadaannya agar keunggulan maupun kendala alami yang dimiliki dapat diidentifikasi sehingga pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi dari sumber daya alam yang ada. Dalam hal ini gejala-gejala yang akan diamati, mencakup:

a. Potensi dan pemanfaatan sumber daya alam

2) Sumber daya manusia perlu dikenali keadaannya karena perlu mengenal karakteristik dari setiap masyarakat yang akan menerima peluang atau manfaat dari pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu, sehingga pemberian daya lebih sesuai dengan kapasitas masyarakat.

Adapun gejala-gejala yang diamati, sebagai berikut:

a. Kecakapan masyarakat untuk diberdayakan

3) Organisasi sebagai salah satu wadah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dikenali agar dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam pemberdayaan dengan sesuai. Adapun gejala-gejala yang diamati mencakup:

b. Peran organisasi dalam pemberdayaan.

4) Sarana dan prasarana menjadi syarat dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat sehingga perlu untuk dikenali agar dapat dimanfaatkan dalam menunjang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, gejala-gejala yang diamati, mencakup:

a. Ketersediaan fasilitas penunjang dan akses

1.8 Fenomena Penelitian

Penelitian ini akan mengamati fenomena penelitian “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten” berdasarkan pada teori yang ada dalam kerangka teori, menggunakan teori Administrasi Publik, Manajemen Publik, Administrasi Pembangunan, Pembangunan, Manajemen Pembangunan, Pemberdayaan, dan Pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi teori maka ditetapkan bahwa penelitian ini akan menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto sebagai konsep pembangunan ekonomi pemberdayaan masyarakat mencakup adanya nilai sosial yang berfokus pada peran dan partisipasi masyarakat, terkhusus masyarakat yang kurang berdaya atau tertinggal untuk memberikan daya secara berkelanjutan. Pembangunan menganggap pemberdayaan masyarakat sebagai isu sentral karena menjadi bentuk tanggapan dari adanya kesenjangan yang menghantui pembangunan nasional, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan, terpencil, dan terbelakang. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat berupaya menekan ketidakberdayaan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses “menjadi” sehingga diperlukan adanya tahapan meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data terkait tujuan dan keuntungan tertentu. Metode penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dan bertahap.

1.9.1 Tipe Penelitian

Studi ini memakai pendekatan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2022). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti terkait keadaan obyek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi, analisis data sifatnya induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna, keunikan, dan penafsiran fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2022). Penelitian kualitatif sebagai pendekatan berguna dalam mempelajari peristiwa secara keseluruhan melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan ungkapan. Tipe dalam metode penelitian ini yaitu deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci terkait objek penelitian, serta menganalisis fenomena sosial. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bermanfaat ketika adanya jawaban atau gambaran yang jelas datang tentang pertanyaan peneliti dalam mengidentifikasi dan menguraikan data secara sistematis.

1.9.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian berupa zona dan area terjadinya fenomena penelitian dan tempat penelitian akan dilaksanakan. Berdasarkan permasalahan, peneliti memilih lokasi penelitian sebagai Desa Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten dengan kerjasama seluruh masyarakat desa dan pemangku kepentingan. Lokasi tersebut dipertahankan karena sesuai dengan karakteristik yang diidentifikasi selama pencarian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian berhubungan dengan target informan yang membagikan informasi terkait data penelitian. Dalam penelitian informan dibutuhkan sebagai narasumber terkait pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Tegalmulyo. Teknik *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini menetapkan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* memilih informan yang dinilai paling mengetahui dan memahami materi maupun masalah terkait hal yang akan diteliti (Sugiyono, 2022). Selain itu, dalam penelitian ini juga digunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang dimulai dari sedikit sumber data awal dan mengalami perkembangan seiring proses pengambilan data (Sugiyono, 2022).

Sumber data pada penelitian ini yaitu individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisata Tegalmulyo. Subjek dalam penelitian ini adalah Pokdarwis Desa Tegalmulyo selaku pengelola Desa Wisata Tegalmulyo sebagai informan kunci. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tegalmulyo sebagai informan utama. Sedangkan, informan pendukung yaitu anggota KTH Pokwis Sapuangin.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang dipakai penelitian ini adalah data kualitatif. Data dapat berbentuk uraian kata maupun kalimat, pernyataan, sumber data statistik, tertulis, ataupun dokumentasi foto. Segala data didapatkan melalui adanya wawancara langsung dengan informan yang kemudian ditransipkan, maupun adanya data yang bisa didapatkan melalui arsip data dan foto dari sumber yang diperlukan, pada

seminar, jalan-jalan, diskusi, dan sebagainya. Selain itu, jenis datanya terdiri transkrip wawancara, dokumentasi (foto), dan dokumen pribadi atau dokumen resmi.

1.9.5 Sumber Data

- 1) Data primer adalah data yang dihimpun dan diteliti dari sumber langsung berasal dari informasi, keterangan, dan fakta lapangan dari wawancara dengan narasumber. Data primer merupakan sumber data secara tidak langsung yang dibuatkan langsung hasil (Sugiyono, 2022).
- 2) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui observasi mandiri peneliti, meliputi dokumen dan sumber penelitian untuk menunjang informasi yang dipublikasikan di internet. Data sekunder yang dipakai merupakan sumber data yang dapat secara langsung untuk memberikan data (Sugiyono, 2022).

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang dinilai paling strategis dalam penelitian ini yang melalui *natural setting* dengan eksperimen pada berbagai responden (Sugiyono, 2018).

- 1) Teknik wawancara

Wawancara sebagai media untuk memverifikasi informasi baru dan informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Teknik wawancara mendalam adalah suatu langkah mengumpulkan informasi untuk keperluan penelitian melalui komunikasi tanya jawab yang disertai kontak langsung antara penanya dengan pemberi informasi. Wawancara

dilaksanakan langsung dan formal dengan informan yang telah dipilih yaitu Pokdarwis Desa Tegalmulyo, Pemerintah Desa Tegalmulyo, masyarakat setempat, dan anggota KTH Pokwis Sapuangin.

2) Observasi

Observasi menjadi cara dalam penelitian dengan mengamati secara langsung. Fokus observasi dalam penelitian ini adalah kondisi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.

3) Dokumentasi

Dokumentasi menjadi cara yang dipakai dalam penelitian dan memahami dokumen berkaitan dengan penelitian. Dokumen dapat berupa dalam bentuk visual, seperti foto, grafik, dan lain-lain. Dalam teknik ini digunakan dokumen berbentuk catatan, rekaman audio, dan foto informan.

1.9.7 Analisis Data

Seluruh data dikelola setelah seluruh data telah terkumpul. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, sedangkan pendekatan kualitatif, yang meliputi deskripsi menyeluruh atas data yang didapatkan. Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh berasal menjadi secara sistematis melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga mudah dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan pada orang lain (Sugiyono, 2022). Langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisis menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2022), yang terdiri dari:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu hingga diperoleh data yang banyak dan bervariasi.

b) Reduksi data

Reduksi data dilaksanakan dengan meringkas, mengidentifikasi pokok-pokok fundamental untuk ditemukan topik dan wujudnya. Data informasi diidentifikasi dengan kategori data yang berkaitan dan tidak berkaitan dengan penelitian. Pada tahap ini, data akan semakin kecil yang terfokus pada titik-titik permasalahan sehingga dapat mewakili objek penelitian dengan eksplisit dan memudahkan peneliti untuk menghimpun data berikutnya (Sugiyono, 2022). Langkah berikutnya adalah visualisasi data, seperti tulisan, gambar, tabel, maupun grafik yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan penjelasan deskriptif naratif untuk mempermudah analisis.

c) Penyajian data

Langkah berikutnya adalah penyajian data hasil dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan membuat visualisasi data, seperti tulisan, gambar, tabel, maupun grafik yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan penjelasan deskriptif naratif untuk mempermudah analisis. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan kemampuan untuk

membaca berbagai jenis data yang berasal dari berbagai sumber, seperti dari audio, video, gambar, maupun tertulis (artikel, buku, atau transkrip wawancara).

d) Menarik kesimpulan

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Setelah seluruh data disajikan, maka perlu memahami hakikat permasalahan yang dijadikan objek penelitian dan kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Tahap terakhir adalah dengan menarik kesimpulan dan verifikasi yang paling relevan dengan isu permasalahan, kegiatan ini jadi untuk menilai mana yang cukup berpotensi untuk mengeluarkannya.

1.9.8 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi kembali keabsahan data yang didapatkan dengan waktu dan instrumen yang sesuai dalam penelitian kualitatif melalui beberapa sumber yang berbeda (Sugiyono, 2022). Triangulasi sumber yang dilaksanakan dengan pengecekan kebenaran data informasi, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian. Sedangkan, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek keabsahan data kepada sumber yang sama, namun melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mempertimbangkan seluruh data yang diperoleh benar adanya (Sugiyono,

2022). Kualitas dari instrumen penelitian yang diberikan harus memberikan data yang *reliable* dan valid keabsahannya.